

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti secara empiris *political connection* terhadap *tax aggressiveness* dengan variabel moderasi komite *audit expertise* dan menggunakan variabel kontrol *return on assets*, *leverage* dan *firm size*. Peneliti mengambil data dari Badan Usaha Milik Negara yang terdapat di Indonesia pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Pada penelitian ini terdapat dua model yang digunakan. Pada model pertama meneliti pengaruh *political connection* (PC_BOD dan PC_BOC) serta *return on asset* (ROA), *leverage* (LEV) dan *firm size* (SIZE) terhadap agresivitas pajak. Dan untuk model yang kedua meneliti pengaruh *political connection* (PC_BOD dan PC_BOC) serta *return on assets* (ROA), *leverage* (LEV) dan *firm size* (SIZE) terhadap agresivitas pajak dengan menambahkan variabel moderasi komite *audit expertise* (ACEXPERT). Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan total 69 sampel data untuk tiap-tiap model. Analisis data panel digunakan peneliti untuk menguji hipotesis pada penelitian ini. Peneliti menggunakan proksi ABTD untuk mengukur variabel dependen pada penelitian ini. Aplikasi yang digunakan peneliti adalah STATA Versi 12 untuk melakukan pengujian hipotesis dan asumsi klasik pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil yang ditemukan maka dapat ditarik kesimpulan jika *political connection* komisaris (PC_BOC) memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan *political connection* direksi (PC_BOD) yang dimoderasi oleh komite audit dengan variabel kontrol *return on assets*, *leverage* dan *firm size* tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

V.2 Keterbatasan Penelitian

Namun penelitian ini tentunya masih memiliki beberapa kekurangan dan dibutuhkan perbaikan untuk penelitian kedepannya. Kekurangan ini dijelaskan untuk memberikan *improve* pada penelitian tentang perpajakan selanjutnya. Berikut keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Masih sedikitnya referensi dan literatur pada penelitian sebelumnya mengenai komite audit memoderasi hubungan antara *political connection* dan agresivitas pajak.
2. Masih banyak perusahaan BUMN yang tidak *publish* laporan tahunannya secara berkala

V.3 Saran

V.3.1 Saran Praktis

1. Untuk perusahaan agar dapat terus mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada.
2. Untuk manajemen perusahaan agar tidak melakukan tindakan penghindaran pajak agar meminimalisir resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan.
3. Sesuai dengan peraturan diharapkan setiap perusahaan memiliki komite audit dengan keahlian dibidang akuntansi dan keuangan.

V.3.2 Saran Teoritis

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak.
2. Dapat menggunakan entitas perusahaan lainnya selain badan usaha milik negara
3. Disarankan agar penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan terkait penggunaan variabel komite *audit expertise* karena masih sedikitnya referensi yang menggunakan variabel tersebut.